

**IMPLEMENTASI KESEPAKATAN GLOBAL MIGRASI DAN *POLYMORPHIC*
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN**

*IMPLEMENTATION OF THE GLOBAL AGREEMENT ON MIGRATION AND
POLYMORPHIC IN INDONESIA FROM AN IMMIGRATION PERSPECTIVE*

<https://10.0.205.137/jikk.v7i2.616>

Submitted: 06-10-2024 Reviewed: 15-10-2024 Published: 20-11-2024

Doni Romdoni
doni.romdoni@ui.ac.id
Universitas Indonesia

Andhika Ario Seno
andhika.ario@ui.ac.id
Universitas Indonesia

Maulana Malik Ibrahim
maulana.malik32@ui.ac.id
Universitas Indonesia

Indra Winanto
indra.winanto@ui.ac.id
Universitas Indonesia

Mauritz Richard Jeferson
maurits.richard@ui.ac.id
Universitas Indonesia

Abstract. *This research examines the implementation of the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration and the application of the polymorphic approach in the context of immigration in Indonesia. The Global Migration Agreement offers a framework to ensure safe and legal migration. The research results show that Indonesia has implemented several important principles, such as protecting migrant rights and strengthening international cooperation. However, challenges are still found in inter-institutional coordination and regional policy alignment. It is hoped that this research will provide insight for the government and related institutions in optimizing migration policies in Indonesia which are in line with international standards.*

Keywords: *Global Agreement on Migration; polymorphic; migration policy; Indonesian immigration.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji implementasi Kesepakatan Global untuk Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur serta penerapan pendekatan *polymorphic* dalam konteks keimigrasian di Indonesia. Kesepakatan Global Migrasi menawarkan kerangka kerja untuk memastikan migrasi yang aman dan legal, tetapi tantangan penerapannya di Indonesia masih memerlukan kajian lebih mendalam, khususnya terkait adaptasi kebijakan lokal dan dinamika sosial-budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah menerapkan beberapa prinsip penting, seperti perlindungan hak migran dan penguatan kerja sama internasional, namun tantangan masih ditemukan dalam aspek koordinasi antar-lembaga dan



keselarasan kebijakan regional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam mengoptimalkan kebijakan migrasi di Indonesia agar selaras dengan standar internasional.

Keywords: Kesepakatan Global Migrasi; *polymorphic*; kebijakan migrasi; keimigrasian Indonesia

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks era globalisasi yang melanda dunia saat ini, fenomena migrasi menjadi sebuah realitas yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan, terutama bagi negara-negara, termasuk Indonesia. Kesepakatan Global Migrasi, yang dikenal sebagai Global Compact for Migration, merupakan inisiatif kolaboratif dari komunitas internasional untuk menghadapi berbagai tantangan terkait dengan perpindahan manusia ini. Fokus utama penelitian ini adalah menjelajahi implementasi Kesepakatan Global Migrasi di Indonesia, dengan penekanan khusus pada konsep *polymorphic* dalam kerangka keimigrasian.

Dalam konteks ini, implementasi Kesepakatan Global Migrasi di Indonesia menjadi fokus utama dalam merespon dinamika migrasi global. Tantangan besar muncul dalam menciptakan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesepakatan tersebut, sambil mempertimbangkan kebutuhan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Selain itu, konsep "*polymorphic*" atau keberagaman dalam konteks keimigrasian perlu diintegrasikan secara bijaksana agar tidak hanya mengakomodasi kebutuhan ekonomi, tetapi juga melindungi hak asasi manusia dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Migrasi, dalam keadaan globalisasi yang semakin meluas, tidak lagi menjadi isu lokal tetapi berkembang menjadi fenomena yang melibatkan banyak aspek, mulai dari ekonomi hingga hak asasi manusia. Kesepakatan Global Migrasi menjadi landasan penting bagi negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk menghadapi tantangan kompleks ini secara bersama-sama.

Kesepakatan Global Migrasi menciptakan landasan kerjasama global untuk mengelola migrasi dengan cara yang terkoordinasi dan terpadu. Sebagai negara dengan sejarah panjang migrasi, Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berfokus

pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhitungkan hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan kearifan lokal. Dalam konteks ini, implementasi Kesepakatan Global Migrasi di Indonesia menjadi sebuah proses yang memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya sebatas pada aspek regulasi dan kebijakan. Konsep *polymorphic* dalam keimigrasian menekankan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman budaya, agama, dan identitas sosial masyarakat penerima migran. Oleh karena itu, perlu adanya dialog intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal, untuk memastikan bahwa kebijakan migrasi tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat Indonesia secara umum.

Penelitian ini memiliki fokus khusus pada konsep *polymorphic*, yang mencakup pengertian tentang beragamnya pola migrasi dan kompleksitasnya dalam kebijakan keimigrasian. Hal ini dianggap penting karena migrasi tidak dapat diidentifikasi sebagai entitas tunggal, tetapi sebagai entitas yang polimorfik, yang berarti memiliki banyak bentuk dan variasi.

Dengan merinci bagaimana Kesepakatan Global Migrasi diimplementasikan di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana negara mengelola dan merespons dinamika migrasi global. Konsep *polymorphic* menjadi landasan teoretis untuk menjelaskan keragaman karakteristik migrasi yang mungkin memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda.

Penelitian ini menjadi relevan dalam konteks kebijakan nasional Indonesia, membahas tantangan dan peluang yang dihadapi negara ini dalam mengimplementasikan Kesepakatan Global Migrasi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang kaya tentang dinamika migrasi di Indonesia, terutama dalam konteks konsep *polymorphic*, dan memberikan sumbangan konstruktif bagi pengembangan kebijakan keimigrasian di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dijalankan dengan pendekatan kualitatif, dengan studi kasus sebagai metode utamanya. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan

fleksibilitas dan mendalam untuk memahami konteks dan kompleksitas implementasi Kesepakatan Global Migrasi di Indonesia.

Studi kasus dipilih sebagai metode utama karena mampu menyajikan gambaran rinci dan kontekstual tentang bagaimana kesepakatan ini diadopsi dan diimplementasikan di tingkat nasional. Fokus pada studi kasus memberikan ruang untuk mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan dalam konteks yang berbeda di berbagai bagian Indonesia, mencakup perbedaan regional, sosial, dan politis.

Data dikumpulkan melalui serangkaian wawancara dengan pemangku kepentingan terkait migrasi. Ini termasuk perwakilan dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam isu-isu migrasi. Wawancara mendalam ini diarahkan untuk memahami perspektif, pengalaman, dan pandangan pemangku kepentingan terkait implementasi Kesepakatan Global Migrasi di Indonesia.

Selain itu, analisis kebijakan akan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dokumen kebijakan yang berkaitan dengan migrasi di tingkat nasional. Ini melibatkan penelusuran dan analisis secara rinci terhadap regulasi, panduan, dan kebijakan terkait Kesepakatan Global Migrasi, serta kebijakan keimigrasian secara umum.

Tinjauan dokumen resmi juga akan menjadi bagian integral dari metodologi ini. Ini mencakup tinjauan terhadap laporan resmi, dokumen kebijakan pemerintah, dan dokumentasi lainnya yang relevan dengan implementasi Kesepakatan Global Migrasi di Indonesia. Tinjauan dokumen ini akan memberikan konteks sejarah dan kebijakan yang mendukung pemahaman mendalam tentang proses implementasi.

Dengan kombinasi metode wawancara, analisis kebijakan, dan tinjauan dokumen resmi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan kontekstual tentang bagaimana Kesepakatan Global Migrasi diimplementasikan di Indonesia serta dampaknya terhadap kebijakan keimigrasian dan perlindungan hak asasi manusia para migran. Pendekatan ini akan memberikan ruang untuk memahami nuansa dan kompleksitas situasi di lapangan dan menggambarkan realitas implementasi kesepakatan ini di tingkat nasional.

3. PENELITIAN

3.1. PERMASALAHAN PENELITIAN

Perubahan dinamika kependudukan dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Transisi demografi dapat digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi terhadap tiga komponen tersebut. Namun, konsep transisi demografi yang dikenal secara umum hanya memperhatikan perubahan penduduk secara alamiah, yaitu fertilitas dan mortalitas.

Menurut Zelinsky (1971) dalam teori transisi migrasi mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara pola migrasi dan pembangunan ekonomi. Teori transisi migrasi membedakan masa transisi menjadi lima tahap yaitu masyarakat tradisional, masyarakat awal transisi, masyarakat akhir transisi, masyarakat maju, dan masyarakat sangat maju. Menurutnya, semakin maju suatu masyarakat akan memengaruhi pola migrasinya. Ditambah lagi adanya suatu perbatasan yang berubah kedalam sistem satu negara, sehingga memudahkan orang-orang melintas dan melakukan migrasi hanya dengan kartu identitas pengenalan tanpa paspor atau juga dengan kondisi bebas visa (Kolosov & Morachevskaya, 2022). Kemajuan sifat atau tujuan melakukan migrasi seakan memaksa harus ada perubahan drastis dari konsep dasar perbatasan. Perbatasan yang mendapat bentuk berbeda dengan mengedepankan perkembangan ekonomi dan sistem sosial budaya (Kolosov & Morachevskaya, 2022). Berkaca pada kondisi di daerah pasca Soviet, ada rezim yang berbeda jika melihat bentuk perbatasan yang akan digunakan para migran. Bentuk tersebut menjelaskan suatu pandangan bahwa aktifitas migrasi memiliki kuasa dalam membentuk suatu identitas satu negara terhadap negara lain yang berbatasan dengan negara tersebut serta memberikan pengakuan hukum di dalamnya.

Para elit politik suatu negara juga berpikiran fungsi perbatasan akan menonjolkan bentuk kedaulatan negara mengacu pada dorongan terhadap perubahan makna perbatasan serta tanggapan akan kondisi orientasi geopolitik dan kode-kode geopolitik tersebut (Kolosov & Morachevskaya, 2022). Bentuk pengawasan kepada para pelaku migrasi akhirnya penting juga mengalami perubahan yang signifikan. Mengingat keamanan dan persatuan bangsa harus

tetap terjaga. Melalui kemudahan melakukan interaksi dengan negara lain terkait bentuk pengawasan yang ideal di beberapa wilayah negara lain yang memiliki beberapa faktor serupa, maka diharapkan hal tersebut dapat membantu mendemonstrasikan bentuk kedaulatan negara yang lebih tegas dan nyata. Dianggap umum bahwa kondisi di tepi daerah suatu negara dekat perbatasan memiliki produk domestik bruto per kapita yang rendah, jumlah orang yang tidak bekerja cukup tinggi, penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga rendah, struktur wilayah yang sempit, populasi yang berkurang dan menua, serta kurangnya peningkatan mengenai pelayanan publik atau pribadi (Kolosov & Morachevskaya, 2022). Sehingga migrasi menjadi solusi oleh kebanyakan orang untuk merealisasikan hidup yang lebih baik.

Teori transisi demografi menggambarkan perubahan fertilitas dan mortalitas yang diawali dari fertilitas dan mortalitas yang tinggi dan berangsur-angsur berubah menjadi rendah, serta mortalitas yang menurun lebih cepat daripada fertilitas. Ketika suatu negara telah berada pada fase fertilitas dan mortalitas yang rendah, maka komponen kependudukan yang lebih memengaruhi dinamika penduduk adalah migrasi (perpindahan penduduk). Migrasi, terutama migrasi internal antardaerah, menjadi faktor penting dalam perubahan dinamika kependudukan di suatu wilayah.

Migrasi di Indonesia memunculkan sejumlah isu krusial yang memerlukan perhatian mendalam. Salah satu isu utama adalah perlindungan hak asasi manusia bagi para migran. Proses migrasi seringkali melibatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia, termasuk eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi. Upaya untuk melindungi hak-hak ini di tengah dinamika migrasi merupakan tantangan utama bagi Indonesia.

Selain itu, isu manajemen batas juga menjadi fokus kritis. Batasan geografis antar-negara memerlukan strategi manajemen yang efektif untuk mengontrol arus migrasi, menjaga keamanan nasional, dan meminimalkan potensi konflik. Permasalahan seputar manajemen batas melibatkan kebijakan keimigrasian, penegakan hukum, dan kolaborasi internasional dalam upaya bersama untuk mengatasi masalah ini.

Pada hakekatnya, migrasi internal merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu

provinsi dan provinsi lainnya. Penduduk dari provinsi yang tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah akan berpindah menuju daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Migrasi penduduk akan terus terjadi selama ada ketimpangan antarprovinsi, baik secara ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya.

Integrasi sosial adalah isu ketiga yang mencuat dalam konteks migrasi di Indonesia. Proses integrasi migran ke dalam masyarakat tuan rumah tidak selalu berjalan mulus, dan mungkin melibatkan ketidaksetaraan, ketegangan budaya, dan ketidakpastian sosial. Oleh karena itu, mencapai integrasi sosial yang berkelanjutan memerlukan strategi kebijakan yang holistik dan berkelanjutan.

Penerapan Kesepakatan Global Migrasi sebagai kerangka kerja global menimbulkan sejumlah permasalahan terkait dengan adaptasi kebijakan di tingkat nasional. Kesepakatan ini mengharuskan negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan dan mengimplementasikan kebijakan nasional yang konsisten dengan prinsip-prinsip Kesepakatan. Adapun, tantangan adaptasi kebijakan melibatkan harmonisasi regulasi nasional dengan norma internasional, *alignment* dengan kebutuhan internal, dan pengintegrasian aspek-aspek krusial seperti perlindungan hak asasi manusia, manajemen batas, dan integrasi sosial.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu tersebut menjadi esensial dalam mengembangkan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap dinamika migrasi di Indonesia. Dengan menyoroti permasalahan ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menanggapi tantangan dan merumuskan solusi yang dapat memperbaiki manajemen migrasi dan melindungi hak serta kesejahteraan para migran di Indonesia.

3.2. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Bety Atmani M., Agus Joko Pitoyo dan Abdur Rofi dengan judul Faktor Individual Dan Kontekstual Pada Migrasi Risen di Indonesia: Analisis Data Survei Penduduk Antar Sensus 2015 pada tahun 2020 memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan melakukan migrasi pada level individual dan kontekstual. Data yang

digunakan adalah hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 dan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah multilevel regresi logistik biner. Hasil analisis menunjukkan bahwa umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, status bekerja, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, kepemilikan rumah, dan daerah tempat tinggal memengaruhi keputusan bermigrasi penduduk berusia 15 tahun ke atas. Migran cenderung menuju ke daerah dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi, serta tingkat pengangguran yang lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviyati Valentina Sidabutar dan Chotib yang berjudul Hubungan Migrasi Terhadap Tingkat Kualitas Sarana Sanitasi Rumah Tangga Di Jakarta: Analisis Data Mikro Susenas 2017 pada tahun 2020 bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan migrasi terhadap tingkat kualitas sarana sanitasi rumah tangga di Jakarta. Studi ini menggunakan regresi logistik multinomial sebagai metode analisis, dengan mengaplikasikan tiga pemodelan hubungan migrasi terhadap tingkat kualitas sarana sanitasi rumah tangga. Data yang digunakan bersumber dari data mikro Susenas tahun 2017. Temuan penelitian secara spesifik menunjukkan pengaruh signifikan migrasi risen terhadap tingkat kualitas sarana sanitasi rumah tangga. Hasil penelitian mengkonfirmasi rumah tangga migran yang menetap lebih lama (migran seumur hidup dan nonmigran risen) berpeluang memiliki sarana sanitasi layakaman. Peluang yang sama berlaku untuk migran risen dengan karakteristik usia lebih tua, pendidikan tinggi, dan pengeluaran tinggi. Sebaliknya, ditemukan persentase rumah tangga pada kategori terendah yang identik dengan status rumah kontrak/sewa dengan kondisi tidak layak huni. Untuk menekan persentase pada kategori terendah, maka pemerintah perlu perencanaan preventif dalam menghadapi arus migrasi, sehingga migran dapat hidup sejahtera di dalam kota.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisatul Husnah yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Seumur Hidup di Indonesia pada tahun 2019 bertujuan untuk melihat: (1) pengaruh pendidikan terhadap migrasi seumur hidup di Indonesia. (2) Pengaruh upah terhadap migrasi seumur hidup di Indonesia. (3) Pengaruh kesempatan kerja terhadap migrasi seumur hidup di Indonesia. (4)

Pengaruh pernikahan terhadap migrasi seumur hidup di Indonesia, dan (5) Pengaruh pendidikan, upah, kesempatan kerja dan upah secara bersama sama terhadap migrasi seumur hidup di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data Statistik Susenas Indonesia tahun 2005-2016. Teknik analisis yang digunakan adalah OLS dengan menggunakan fixed effect model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap migrasi seumur hidup. Secara parsial variabel upah, kesempatan kerja dan pernikahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi seumur hidup di Indonesia. Secara bersama-sama variabel pendidikan, upah, kesempatan kerja dan pernikahan berpengaruh signifikan terhadap migrasi seumur hidup di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Karina dan Maidah Purwanti yang berjudul Kebijakan Nasional Indonesia terhadap Migrasi Internasional pada tahun 2021 bertujuan untuk menjelaskan kebijakan nasional terkait migrasi pengungsi, perdagangan manusia, dan perlindungan tenaga kerja asing dalam konteks migrasi internasional. Migrasi dapat terjadi karena keinginan dari seseorang tersebut maupun paksaan dari keadaan yang membuat seseorang harus bermigrasi. Pada umumnya, migrasi dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang ingin mendapatkan hidup yang lebih layak dengan cara mencari pekerjaan yang lebih layak juga di negara lain. Di sisi lain, faktor lain yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu, bencana alam, wabah penyakit yang meluas, dan kriminalitas yang tinggi di negara asalnya. Dengan demikian, peran pemerintah melalui aparat penegak hukum dan pejabat publik yang terkait harus melakukan koordinasi yang baik, tegas dan adil dalam penegakan hukumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimanapun keberhasilan peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya, migrasi internasional juga tergantung dari pelakunya, apakah bermaksud baik atau tidak. Sepintar-pintarnya seseorang yang membuat kebijakan, akan selalu lebih pintar seseorang yang ingin melanggar kebijakan tersebut.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah melibatkan analisis dampak migrasi terhadap berbagai aspek, menyoroti implikasi ekonomi, sosial, dan budaya dari fenomena ini. Kajian-kajian tersebut secara luas menggambarkan bagaimana perpindahan manusia dapat mempengaruhi perkembangan negara, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, meski telah ada banyak penelitian yang

menyelidiki dampak migrasi, penelitian khusus yang mengeksplorasi implementasi Kesepakatan Global Migrasi di Indonesia masih tergolong minim.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengungkapkan dampak ekonomi migrasi terhadap negara asal dan negara tujuan. Analisis ekonomi sering kali mencakup peran migran dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur pekerjaan, dan transfer remitansi. Selain itu, beberapa penelitian telah menyoroti perubahan sosial dan budaya yang mungkin terjadi akibat interaksi antara kelompok migran dan masyarakat tuan rumah.

Meskipun penelitian tersebut memberikan wawasan yang berharga tentang dampak migrasi secara umum, penelitian khusus yang mengeksplorasi implementasi Kesepakatan Global Migrasi di Indonesia masih terbatas. Kesepakatan ini memberikan suatu kerangka kerja global yang mencakup berbagai aspek migrasi, termasuk perlindungan hak asasi manusia migran, manajemen batas, dan integrasi sosial. Oleh karena itu, untuk memahami sejauh mana Indonesia melibatkan diri dalam kesepakatan ini dan bagaimana implementasinya memengaruhi kebijakan keimigrasian di tingkat nasional, diperlukan penelitian yang lebih khusus.

Penelitian yang lebih fokus pada implementasi Kesepakatan Global Migrasi di Indonesia akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang sejauh mana negara ini melibatkan diri dalam komitmen global terkait migrasi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah pengetahuan yang masih ada dalam literatur dan memberikan kontribusi berharga terhadap pemahaman tentang implementasi kesepakatan ini di konteks Indonesia.

3.3. RESEARCH GAPS

Meskipun banyak penelitian telah membahas dampak migrasi di Indonesia, terdapat kesenjangan pengetahuan yang mencolok dalam literatur terkait dengan implementasi Kesepakatan Global Migrasi, terutama dalam konteks *polymorphic* yang menyoroti keragaman dan kompleksitas migrasi.

Pertama-tama, kebanyakan penelitian eksisting lebih cenderung menjelajahi dampak ekonomi atau sosial migrasi, seringkali meninggalkan aspek-aspek spesifik yang diakui oleh Kesepakatan Global Migrasi. Kesenjangan ini menciptakan kebutuhan untuk fokus pada implementasi konkret Kesepakatan

tersebut di Indonesia, apakah prinsip-prinsipnya diadopsi dan diimplementasikan di tingkat nasional.

Kedua, konsep *polymorphic*, yang menyoroti keragaman dan kompleksitas migrasi, belum sepenuhnya diperbandingkan dan dianalisis dalam konteks Indonesia. *Polymorphic* menjadi penting karena migrasi di Indonesia mencakup berbagai pola, termasuk pekerja migran, pengungsi, dan imigran yang mencari perlindungan. Kesenjangan pengetahuan ini membutuhkan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana kebijakan dan praktik migrasi di Indonesia mencerminkan dan merespons keragaman ini.

Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam literatur mengenai sejauh mana penerapan Kesepakatan Global Migrasi dapat menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan adil untuk perlindungan hak asasi manusia para migran di Indonesia. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi apakah dan bagaimana implementasi Kesepakatan ini dapat memitigasi risiko pelanggaran hak asasi manusia yang seringkali terjadi selama proses migrasi.

Dengan mengidentifikasi dan mengisi kesenjangan pengetahuan ini, penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan kontekstual tentang implementasi Kesepakatan Global Migrasi di Indonesia, memandu kebijakan, dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang dinamika migrasi dalam konteks *polymorphic*.

3.4. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana implementasi Kesepakatan Global Migrasi di Indonesia berkaitan dengan kebijakan keimigrasian?
- b. Apa peran konsep *polymorphic* dalam menanggapi berbagai aspek migrasi di Indonesia?
- c. Bagaimana adaptasi kebijakan nasional terhadap Kesepakatan Global Migrasi mengatasi tantangan keimigrasian?

3.5. TUJUAN PENELITIAN

- a. Menganalisis implementasi Kesepakatan Global Migrasi dalam kebijakan keimigrasian Indonesia.
- b. Memahami konsep *polymorphic* dalam konteks migrasi di Indonesia.

- c. Mengevaluasi dampak Kesepakatan Global Migrasi terhadap integrasi sosial dan hak asasi manusia migran.

3.6. SIGNIFICANCES

Penelitian ini memegang peranan penting dalam menyumbangkan wawasan mendalam terhadap dinamika dan tantangan migrasi yang dihadapi oleh Indonesia, khususnya dalam implementasi Kesepakatan Global Migrasi. Arti penting dari penelitian ini terletak pada beberapa aspek krusial.

Pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana Indonesia beradaptasi dengan prinsip-prinsip dan tujuan Kesepakatan Global Migrasi. Dengan menggali implementasi kesepakatan ini di tingkat nasional, hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi utama bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi sejauh mana Indonesia telah berkomitmen dan melibatkan diri dalam solusi global untuk isu-isu migrasi.

Kedua, penelitian ini memiliki dampak potensial pada perbaikan kebijakan keimigrasian di Indonesia. Dengan menyoroti keberhasilan dan kendala dalam implementasi Kesepakatan Global Migrasi, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Pemahaman mendalam terhadap bagaimana prinsip-prinsip Kesepakatan ini diterapkan secara efektif atau dihambat di tingkat nasional dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan konteks lokal.

Ketiga, arti penting penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap perlindungan hak migran. Dengan menyoroti aspek Kesepakatan Global Migrasi yang berfokus pada hak asasi manusia para migran, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi area-area di mana perlindungan masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memberikan dasar bagi penguatan mekanisme perlindungan hak asasi manusia para migran di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini bukan hanya mengisi kesenjangan pengetahuan dalam literatur, tetapi juga memberikan kontribusi yang konkret terhadap perbaikan kebijakan dan perlindungan hak asasi manusia para migran di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang

berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti yang tertarik dalam memahami dan meningkatkan pengelolaan migrasi di Indonesia dalam konteks Kesepakatan Global Migrasi.

4. TEORI DAN KONSEP

4.1. TEORI MIGRASI GLOBAL

Teori Migrasi Global merupakan kerangka kerja teoretis yang penting untuk memahami fenomena migrasi di tingkat global. Beberapa teori utama yang mendasari Kesepakatan Global Migrasi termasuk Teori *Push-Pull*, Teori Jaringan, dan Teori Sistem Dunia.

- Teori *Push-Pull*

Teori *Push-Pull* adalah salah satu teori sentral dalam memahami dinamika migrasi global. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk bermigrasi dipengaruhi oleh faktor dorongan (*push*) dari negara asal dan faktor tarikan (*pull*) dari negara tujuan. Faktor dorongan dapat mencakup konflik, ketidakstabilan politik, kekurangan lapangan pekerjaan, atau bencana alam, yang mendorong individu untuk meninggalkan negara asal mereka. Di sisi lain, faktor tarikan mencakup peluang pekerjaan, kehidupan yang lebih baik, pendidikan, atau stabilitas politik yang menarik individu ke negara tujuan. Kesepakatan Global Migrasi mencoba mengatasi tantangan yang muncul dari faktor-faktor ini dengan mempromosikan manajemen migrasi yang teratur dan manusiawi.

- Teori Jaringan

Teori Jaringan menyoroti peran jaringan sosial dalam mendukung proses migrasi. Menurut teori ini, individu cenderung bermigrasi ke tempat-tempat di mana mereka memiliki hubungan atau jaringan sosial yang kuat. Jaringan ini dapat mencakup keluarga, teman, atau komunitas etnis yang sudah ada di negara tujuan. Kesepakatan Global Migrasi mencoba memahami dan memanfaatkan kekuatan jaringan sosial ini dengan mempromosikan integrasi sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi para migran.

- Teori Sistem Dunia

Teori Sistem Dunia mengeksplorasi hubungan antara migrasi internasional dan struktur ekonomi global. Teori ini menyatakan bahwa aliran migrasi dipengaruhi oleh ketidaksetaraan ekonomi antara negara-negara di dalam sistem dunia. Negara-negara yang termasuk dalam inti atau pusat ekonomi global cenderung menjadi destinasi migrasi, sementara negara-negara pinggiran atau tepi cenderung menjadi negara asal migran. Kesepakatan Global Migrasi mencoba mengatasi dampak ketidaksetaraan ini dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan.

- Kesepakatan Global Migrasi sebagai Integrasi Teori

Kesepakatan Global Migrasi mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan elemen-elemen kunci dari teori migrasi global ke dalam pendekatan yang holistik. Dalam konteks kesepakatan ini, negara-negara diakui memiliki tanggung jawab bersama untuk mengelola migrasi secara terkoordinasi dan manusiawi. Prinsip-prinsip seperti perlindungan hak asasi manusia, integrasi sosial dan ekonomi, serta manajemen perbatasan yang efektif dijadikan landasan untuk menciptakan lingkungan migrasi yang lebih baik.

Secara khusus, Kesepakatan Global Migrasi menetapkan 23 tujuan yang mencakup aspek-aspek seperti pemahaman yang lebih baik tentang migrasi, perbaikan dalam memberikan perlindungan kepada migran, peningkatan akses ke layanan dasar bagi migran, dan pembangunan kebijakan migrasi yang lebih terkoordinasi di tingkat global. Dengan menggabungkan teori-push pull, teori jaringan, dan teori sistem dunia ke dalam kesepakatan ini, masyarakat internasional berupaya untuk merespons kompleksitas dan tantangan migrasi global secara lebih komprehensif. Kesepakatan ini juga mengakui bahwa solusi yang efektif memerlukan kolaborasi lintas-batas, serta pendekatan yang memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya migrasi. Dengan demikian, Kesepakatan Global Migrasi menjadi langkah maju menuju manajemen migrasi yang lebih terarah dan berkeadilan di tingkat global.

4.2. KONSEP *POLYMORPHIC*

Konsep *Polymorphic*, atau sering disebut sebagai *polymorphism*, adalah suatu pendekatan yang diadaptasi dari bidang biologi untuk memahami keragaman dan kompleksitas migrasi dalam konteks sosial dan budaya. Dalam konteks migrasi, konsep ini menunjukkan bahwa perpindahan manusia tidak dapat diidentifikasi sebagai entitas tunggal dengan karakteristik homogen. Sebaliknya, migrasi memiliki banyak bentuk, variasi, dan karakteristik yang tergantung pada berbagai faktor, termasuk asal-usul, motivasi, dan konteks geopolitik. *Polymorphic* dalam konteks migrasi mencakup berbagai tipe migrasi seperti migrasi ekonomi, migrasi akibat konflik, dan migrasi suku, yang masing-masing memiliki ciri khas dan kompleksitasnya sendiri.

Konsep *Polymorphic*, yang diterjemahkan dari bidang biologi ke dalam konteks migrasi, menyajikan pandangan bahwa fenomena migrasi tidak dapat direduksi menjadi entitas tunggal atau stereotip. Sebaliknya, migrasi memiliki keragaman yang kompleks, mencakup berbagai bentuk, motivasi, dan dampak yang dapat bervariasi secara signifikan. Konsep ini mengakui bahwa perpindahan manusia tidak dapat disederhanakan menjadi satu model atau pola, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang berinteraksi.

- Variasi Motivasi

Migrasi dalam konteks konsep *polymorphic* mencakup berbagai motivasi yang mendorong individu untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Motivasi ini dapat berkisar dari pencarian peluang ekonomi, melarikan diri dari konflik atau kekerasan, hingga hasrat untuk menggali pengalaman baru dan budaya. Variasi motivasi ini menciptakan pola migrasi yang kompleks, di mana setiap perpindahan memiliki latar belakang dan tujuan yang unik.

- Migrasi Ekonomi

Migrasi ekonomi adalah salah satu aspek *polymorphic* yang signifikan. Individu sering kali bermigrasi untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, mencari pekerjaan yang lebih baik, peluang bisnis, atau pengembangan keterampilan. Migrasi ekonomi dapat menghasilkan variasi dalam profil

migran, termasuk tingkat pendidikan, keahlian, dan jenis pekerjaan yang dikejar, menciptakan lanskap migrasi yang beragam.

- Migrasi Akibat Konflik

Migrasi yang diakibatkan oleh konflik, perang, atau kekerasan politik adalah bentuk lain dari konsep *polymorphic*. Individu dan keluarga yang terdampak langsung oleh ketidakstabilan politik atau konflik bersenjata dapat bermigrasi untuk melarikan diri dari bahaya atau mencari perlindungan di tempat yang lebih aman. Pola dan dampak migrasi dalam konteks ini dapat bervariasi tergantung pada intensitas dan durasi konflik.

- Migrasi Suku dan Budaya

Migrasi yang terkait dengan identitas suku dan budaya juga merupakan aspek *polymorphic* yang menonjol. Beberapa kelompok suku atau komunitas adat dapat bermigrasi untuk menjaga warisan budaya mereka, mencari peluang untuk mempraktikkan tradisi mereka, atau untuk melindungi diri dari ancaman terhadap identitas budaya mereka. Migrasi suku dapat menciptakan keragaman dalam pola migrasi, menciptakan hubungan antara migrasi dan pelestarian warisan budaya.

- Dampak Lingkungan dan Perubahan Iklim

Konsep *Polymorphic* juga memasukkan aspek migrasi yang terkait dengan perubahan iklim dan dampak lingkungan. Migrasi akibat bencana alam, kenaikan permukaan air laut, atau degradasi lingkungan dapat memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda. Selain itu, individu dan komunitas yang terdampak perubahan iklim juga dapat mengambil langkah-langkah untuk beradaptasi atau mitigasi, yang dapat menciptakan variasi dalam respon migrasi.

- Integrasi dalam Komunitas Penerima

Migrasi dalam konteks konsep *polymorphic* tidak hanya melibatkan pergerakan fisik, tetapi juga melibatkan integrasi dalam komunitas penerima. Migran dapat membawa serta beragam keterampilan, pengalaman, dan perspektif budaya yang memberikan kontribusi pada keragaman dan dinamika dalam komunitas penerima. Dalam hal ini, integrasi migran menjadi aspek yang unik dan bervariasi.

- Keterlibatan Diaspora dan Hubungan Transnasional

Polymorphic juga mencakup keterlibatan diaspora dan hubungan transnasional. Migran sering membentuk jaringan dan komunitas di luar batas negara mereka, menjalankan praktik bisnis, menyokong keluarga di negara asal, atau berkontribusi pada pembangunan di kedua negara. Hubungan transnasional ini menciptakan dimensi tambahan dalam dinamika migrasi.

Melalui pengakuan terhadap keragaman dan kompleksitas migrasi dalam konsep *polymorphic*, masyarakat dan pengambil kebijakan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan dan konteks unik migran. Kesepakatan Global Migrasi mencoba merespon konsep ini dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap keberagaman migrasi di seluruh dunia.

Implementasi Kesepakatan Global Migrasi di Indonesia, dengan memperhatikan konsep *Polymorphic*, melibatkan pengakuan terhadap keragaman dan kompleksitas migrasi yang dihadapi oleh negara ini. Konsep ini tidak hanya mengacu pada variasi dalam jenis migrasi tetapi juga mempertimbangkan keberagaman dalam latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya para migran. Dengan memahami migrasi sebagai suatu fenomena yang *polymorphic*, Kesepakatan Global Migrasi diharapkan dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan konteks lokal dan memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika migrasi yang berubah.

Penting untuk mengeksplorasi dan memahami secara lebih mendalam konsep-konsep teoritis ini karena mereka memberikan dasar pemahaman yang kritis terhadap fenomena migrasi global dan implementasi Kesepakatan Global Migrasi di tingkat nasional. Dengan mengintegrasikan teori migrasi global dan konsep *polymorphic*, penelitian ini akan dapat memberikan perspektif yang lebih kaya dan komprehensif terhadap dinamika migrasi di Indonesia, dengan fokus pada keberagaman dan kompleksitas sebagai elemen kunci dalam analisisnya.

5. HASIL

Bagian ini menguraikan hasil penelitian terkait dengan implementasi Kesepakatan Global Migrasi di Indonesia dan dampaknya terhadap kebijakan keimigrasian, dengan mempertimbangkan konsep *polymorphic*.

- Implementasi Kesepakatan Global Migrasi di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mengimplementasikan Kesepakatan Global Migrasi. Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip kesepakatan ini ke dalam kebijakan dan regulasi keimigrasian nasional. Ada upaya yang nyata untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia para migran, dengan menekankan perlunya peningkatan keadilan sosial dan hak-hak dasar para migran.

Namun, terdapat variasi dalam implementasi kesepakatan ini di berbagai tingkat pemerintahan dan lokasi geografis di Indonesia. Beberapa daerah mungkin menghadapi kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip kesepakatan tersebut, terutama yang berkaitan dengan integrasi sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hasil penelitian menyoroti pentingnya adopsi dan implementasi yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan efektivitas kesepakatan ini.

- Dampak pada Kebijakan Keimigrasian

Dalam konteks kebijakan keimigrasian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesepakatan Global Migrasi telah mendorong perubahan signifikan dalam regulasi keimigrasian di Indonesia. Terdapat upaya untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang mencakup peningkatan dalam manajemen batas, proses integrasi sosial, dan peningkatan perlindungan hak asasi manusia migran.

Namun, pemahaman konsep *polymorphic* sangat penting dalam merinci dampak kebijakan keimigrasian. Migrasi di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, termasuk pekerja migran, pengungsi, dan imigran yang mencari perlindungan. Oleh karena itu, kebijakan keimigrasian harus mampu menyesuaikan diri dengan keragaman ini dan mengakui bahwa pendekatan yang bersifat *polymorphic* diperlukan untuk mengatasi kompleksitas migrasi.

Dalam konteks manajemen batas, kesadaran terhadap variasi jenis migrasi telah menyebabkan peningkatan dalam pengelolaan perbatasan yang lebih inklusif. Upaya dilakukan untuk memahami dan merespons dinamika migrasi yang berbeda, mengakui bahwa kebijakan yang berfokus pada keamanan nasional saja tidak dapat mengakomodasi keragaman migrasi.

Dalam integrasi sosial, terdapat langkah-langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap para migran. Program-program pendidikan dan sosialisasi diperkuat untuk mengatasi stigma dan meningkatkan kerjasama antara migran dan masyarakat lokal. Hal ini mencerminkan pemahaman konsep *polymorphic* yang menekankan bahwa integrasi sosial memerlukan pendekatan yang beragam dan kontekstual.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun terdapat perubahan positif, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan dampak kebijakan keimigrasian. Beberapa daerah atau kelompok masyarakat mungkin masih menghadapi kesulitan dalam mengadaptasi kebijakan baru atau memahami perubahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kesepakatan ini benar-benar diimplementasikan secara merata di seluruh Indonesia.

- **Pertimbangan Konsep *Polymorphic***

Konsep *polymorphic* membantu dalam menyimpulkan bahwa setiap tindakan kebijakan harus mengakui keragaman dan kompleksitas migrasi. Meskipun terdapat panduan global dalam Kesepakatan Global Migrasi, implementasinya harus bersifat dinamis dan responsif terhadap konteks migrasi yang berbeda. *Polymorphic* menunjukkan bahwa kebijakan keimigrasian harus mengakui perbedaan antara tipe migrasi, memperlakukan setiap kelompok dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi konsep *polymorphic*, kesimpulan dapat diambil bahwa implementasi Kesepakatan Global Migrasi di Indonesia telah menghasilkan perubahan positif dalam kebijakan keimigrasian. Namun, tantangan masih ada, dan pemahaman konsep *polymorphic* harus terus dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan di masa depan. Rekomendasi termasuk peningkatan kerjasama antarwilayah di Indonesia, penguatan program pendidikan publik tentang migrasi, dan peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan keimigrasian. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang berharga bagi pembuat kebijakan,

akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola dan memahami migrasi di Indonesia secara lebih holistik dan kontekstual.

Kesimpulan akan merangkum temuan utama penelitian, memberikan rekomendasi kebijakan, dan mengidentifikasi arah penelitian masa depan. Dengan mengikuti sistematika penulisan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami implementasi Kesepakatan Global Migrasi dan konsep *polymorphic* di Indonesia, serta memberikan panduan kebijakan untuk meningkatkan manajemen migrasi dan perlindungan hak asasi manusia para migran. Hal tersebut perlu kembali ditegaskan sebagai bentuk mengganti paradigma dari berbagi beban atas kondisi migran, menjadi berbagi tanggung jawab terkait hak asasi manusia yang melekat pada migran. Peningkatan yang diharapkan nantinya akan menghasilkan mekanisme implementasi mengenai manajemen migrasi yang mengandung penerapan hak asasi manusia migran di dalamnya. Dengan begitu hasil yang lebih terukur seharusnya bisa didapat. Penerapan yang menggunakan pendekatan hak asasi manusia mengikuti hasil penelitian ini.

Namun, meskipun terdapat perubahan positif, tantangan masih ada. Salah satunya adalah kompleksitas migrasi yang beragam dan dinamis di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, rekomendasi pertama adalah penguatan kerjasama antarwilayah. Hal ini penting untuk mengatasi perbedaan dalam pola dan karakteristik migrasi yang dapat berbeda di setiap wilayah di Indonesia. Kolaborasi yang kuat antarwilayah akan memungkinkan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kondisi setempat.

Kedua, untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang fenomena migrasi, perlu adanya program pendidikan publik yang menyeluruh. Program ini akan membantu mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang peran migran dalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga akan dikembangkan penerapan program ini dalam bentuk kebijakan atau protokol yang lebih lanjut. Resolusi program yang berefek pada penyediaan solusi tentang kerjasama yang lebih baik lagi dengan negara-negara penerima migran. Solusi seperti kebijakan strategis dan implementasi mengenai pendanaan migran juga penting untuk diperjelas. Oleh karena itu, perlu komitmen yang tegas terhadap program ini karena pasti akan memiliki dampak yang berkelanjutan. Terlebih lagi

komitmen negara-negara yang mengirimkan migran, harus ada bentuk nyata pengawasan pengiriman migran yang sesuai dengan standar internasional. Sebagai tindak lanjut yang nyata seperti skema minim resiko, lebih cocok dengan budaya migran, dan bekerja sama dengan organisasi internasional. Dapat disimpulkan program yang baik dengan komitmen yang bulat dengan pendekatan yang tepat akan menerima bentuk seperti dukungan finansial, termasuk di dalamnya dukungan dalam informasi dan teknologi yang lebih cocok dalam mengatasi kesenjangan pekerja, lalu dukungan yang lebih humanis, dan akhirnya akan mendukung bentuk solid dalam peningkatan infrastruktur pola migrasi yang punya standar.

Selain itu, evaluasi dan pengawasan terus-menerus atas kebijakan keimigrasian diperlukan. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan perubahan dinamika migrasi yang terus berubah.

Terakhir, untuk pengembangan lebih lanjut, penelitian masa depan dapat difokuskan pada aspek spesifik konsep "polimorfik" dalam konteks keimigrasian di Indonesia. Ini akan memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana konsep ini dapat lebih diterapkan dalam kebijakan migrasi di setiap wilayah. Bahwa dengan konsep ini diharapkan dapat menciptakan pola kewilayahan yang lebih stabil secara pelaksanaan dan perkembangan ekonomi. Karena yang terjadi saat ini masih ada ketidakstabilan pada pola perbatasan kontemporer termasuk juga kepastian sistem. Akibat tidak adanya kota besar di dekat perbatasan, maka konsep "polimorfik" ini menjadi perkembangan yang dapat diperjelas dalam pelaksanaan fungsinya. Mengenai perbatasan, memang pada perkembangannya tidak lepas dari aspek sejarah dan geografinya, karena aspek tersebut mengambil peran penting dalam peningkatan ekonomi dari daerah tersebut sehingga punya penilaian tersendiri dalam menerima orang asing masuk wilayah tersebut.

Polarisasi bisa saja terjadi tentang konsep perbatasan yang layak untuk diterapkan. Hal itu dapat terjadi mengingat adanya transformasi pasar yang meningkat ke arah aktifitas ekonomi yang semakin gencar, lalu adanya pemusatan wilayah-wilayah yang akan menerima investasi besar, dan orientasi konsep negara industri yang dimulai dari populasi terbanyak di daerah ibukota. Namun demikian, saat-saat sekarang ini pengembangan konsep "polimorfik"

direkomendasikan karena kerjasama industri juga mulai menysar daerah dekat perbatasan. Industri pertanian dan perkebunan, industri transportasi dan perdagangan ditingkat kecil-menengah menjadi ketertarikan pelaksanaan bisnis di daerah perbatasan. Ditambah lagi pada daerah tersebut tidak terlalu berdampak akan perkembangan demografi. Melalui survei dan wawancara yang dilakukan pada penelitian ini, maka perspektif keimigrasian yang mengikat pada kewajiban menjaga kedaulatan negara akan baik dilaksanakan dengan konsep ini. Manfaat yang menjadi tujuan penggunaan konsep ini adalah untuk mendapatkan bentuk pengawasan yang tepat dan penuh koordinasi antara swasta dan pemerintah, sehingga wilayah tersebut aman dari ancaman perusak kedaulatan negara. Namun demikian, perlu penelitian yang lebih dalam melihat perspektif keimigrasian pada konflik ini, mengingat masih harus ditemukan rekan potensial dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan luasnya pemahaman keimigrasian yang pengkajiannya masih berlanjut karena sifat, bentuk dan pola migrasi berkembang mengikuti zaman.

Jangan sampai pemahaman kedaulatan dengan perspektif kewajiban pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian membuat kebutuhan akan peningkatan taraf hidup masyarakat yang diinisiasi dalam bentuk pola masuknya orang asing ke suatu negara jadi terhambat. Karena pada penelitian lainnya perbatasan dengan konsep yang tepat akan memberi bermacam manfaat diantaranya adalah ada perdagangan atau bisa berupa ekspor dan impor dan ada peningkatan pelayanan kesehatan juga pendidikan yang didapat dari kemajuan negara tetangga. Interaksi yang didapat dari pelaksanaan konsep “polimorfik” ini akan membawa strata sosial masyarakat meningkat lebih merata, bukan hanya populasi masyarakat di ibukota provinsi bahkan ibukota negara. Indonesia yang memiliki perbatasan darat dengan negara tetangga ketika menjadi subjek konsep “polimorfik” ini, maka harapan yang timbul dari masyarakat yang tinggal di sekitaran batas negara adalah perlintasan batas negara yang dilalui untuk ke negara tetangga begitu juga sebaliknya ketika negara tetangga datang ke Indonesia memiliki sistem yang berkepastian hukum. Kondisi yang diperkenankan adalah kepastian hukum yang membawa peningkatan ekonomi bagi wilayah perbatasan kedua negara. Apabila ada proyek integrasi perbatasan yang menguntungkan kedua negara harusnya

menjadi proyek strategis yang akan membawa kesejahteraan masyarakat dalam bidang sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Dengan begitu perspektif keimigrasian dalam kaitannya kooperatif melalui konsep “polimorfik” bisa berdampak lebih lanjut ke bidang ekonomi.

Dengan mengikuti rekomendasi ini, diharapkan implementasi Kesepakatan Global Migrasi dan pemahaman konsep "polimorfik" dapat menjadi landasan yang lebih kuat dalam pengelolaan migrasi di Indonesia, menciptakan kebijakan yang lebih adaptif, dan melindungi hak asasi manusia para migran sesuai dengan kondisi setempat yang beragam.

Adapun rekomendasi lain yang juga dapat dijadikan opsi yakni berupa:

1. Penguatan Kerjasama Antarwilayah : Meningkatkan kolaborasi antarwilayah di Indonesia untuk mengatasi perbedaan dinamika migrasi yang ada
2. Program Pendidikan Publik : Memperkuat program pendidikan publik untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang migrasi, termasuk dampaknya secara sosial, ekonomi, dan budaya
3. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi : Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan keimigrasian untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan dinamika migrasi.
4. Penelitian Masa Depan : Mengarahkan penelitian selanjutnya pada aspek-aspek spesifik konsep "polimorfik" dalam konteks keimigrasian di Indonesia untuk lebih memahami dampaknya terhadap kebijakan migrasi.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan bahwa implementasi Kesepakatan Global Migrasi dan pemahaman konsep "polimorfik" dapat terus ditingkatkan untuk memperkuat kebijakan keimigrasian di Indonesia, yang pada akhirnya akan mendukung manajemen migrasi yang lebih efektif dan perlindungan hak asasi manusia bagi para migran.

DAFTAR PUSTAKA

Adha, M., I (2015). Dampak Migrasi terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia: Analisis Data IFLS 2000 dan 2007. Tesis. Tidak

Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

- Bety Atmani M., A. J., & Rofi, A. (2020). FAKTOR INDIVIDUAL DAN KONTEKSTUAL PADA MIGRASI RISEN DI INDONESIA: ANALISIS DATA SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS 2015. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 183-196.
- Husnah, A. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIGRASI SEUMUR HIDUP DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* , 331-340.
- Iza, N. (2017). Frekuensi Alel, Heterozigositas dan Migrasi Alel pada Populasi Etnis Jawa dan Madura di Malang dan Madura, Jawa Timur, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sains*. 17(1): 43–50.
- Kolosov, V. & Morachevskaya, K. (2022). The Role of an Open Border in the Development of Peripheral Border Regions: The Case of Russian-Belarusian Borderland. *Journal of Borderlands Studies*, 37 (3), 533-550.
- Karina, M. P. (2021). Kebijakan Nasional Indonesia terhadap Migrasi Internasional . *Journal of Law And Border Protection*.
- Noviyati Valentina Sidabutar, C. (2020). HUBUNGAN MIGRASI TERHADAP TINGKAT KUALITAS SARANA SANITASI RUMAH TANGGA DI JAKARTA: ANALISIS DATA MIKRO SUSENAS 2017 . *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 165-182.